

Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak

Rahmat Setiawan

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

wawan.rstw@gmail.com

Abstrak

Istilah subaltern merujuk pada populasi yang secara sosial, politik, dan geografis ditundukkan oleh suatu kelompok yang menguasai mereka. Dari sana kita memahami bahwa selalu ada praktik hegemonik dalam diskusi subaltern yang mana suara mereka selalu dimanipulasi secara etis sebagai bagian dari praktik politik suatu kelompok untuk mendominasi. Itu mengapa kelompok subaltern merupakan alat dari suatu praktik hegemonik yang melambangkan dominasi politik, militer, sosial, dan bahkan kultural oleh suatu kelompok di atas kelompok lainnya. Karena hegemoni bersifat tak langsung, maka praktik ini biasanya dioperasikan melalui hal-hal yang bersifat ideologi dan cenderung etis terhadap kelompok yang akan dikuasai, dan dalam kajian teoretis Spivak, kelompok subaltern adalah kelompok yang suaranya selalu direpresentasikan, sementara representasi hanyalah alat untuk menuju dominasi nyata. Oleh karena itu, topik mengenai subaltern adalah mengenai bentuk praktik politik etis kelompok hegemon terhadap kelompok subaltern yang menjelaskan adanya hegemoni yang bertopeng.

Kata kunci: subaltern; politik etis; hegemoni; Spivak.

Abstract

The term of subaltern refers to a population that is socially, politically, and geographically subjugated by a controlling group over them. Based on that, we understand that there is always a hegemonic practice in subaltern discussions where their voices are always ethically manipulated as part of a group's political practice to dominate. Accordingly, subalterns are just a tool of a hegemonic practice that symbolizes political, military, social, and even cultural domination by a group against the other. Since hegemony is indirect, it is usually operated through ideological and ethical inclinations to the dominated group, and in Spivak's perspective, the subaltern group is a group whose voices are always represented, while the representation is only a tool for the actual domination. Therefore, the topic of the subaltern is about the form of ethical practice of the hegemonic group against the subaltern group and it explains the practice of the masked hegemony.

Keywords: subaltern; ethical policy; hegemony; Spivak

Pendahuluan

Spivak memfokuskan permasalahan pascakolonialisme pada subalternitas. Istilah *subaltern* memiliki konotasi yang cukup luas karena secara terminologis, *subaltern* pada dasarnya merujuk pada perwira junior dalam konteks militer Inggris, yang secara harfiah berarti *bawahan*. Selain itu, kata ini juga sering digunakan untuk menggambarkan petugas yang berpangkat ren-

dah atau di bawah pangkat kapten. Sementara itu, dalam kajian teori kritis dan pascakolonialisme, istilah *subaltern* merujuk pada populasi yang secara sosial, politik dan geografis berada di luar struktur kekuatan hegemonik bangsa kolonial.

Istilah ini sendiri *dipromosikan* pertama kali oleh Antonio Gramsci, terutama melalui karyanya mengenai hegemoni kultural, yang mengidentifikasi kelompok-kelompok yang dikecualikan, diekslu-

si, dan dikucilkan dalam tatanan sosial. Dari konotasi negatif tersebut, Spivak mengembangkan bahwa *subaltern* bukan hanya kata berkelas yang ditunjukkan bagi kelas yang *tertindas* atau bagi kelompok *the Other*. Bagi Spivak, di dalam istilah pascakolonial, istilah tersebut merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan pembatasan akses. Ia menjadi semacam ruang pembedaan.

Akan tetapi, Spivak menjelaskan paradoks yang selalu salah dipahami. Masalah utama *subaltern* bukan hanya mengenai kategori orang yang tertindas atau kelas pekerja yang tertindas, namun juga mengenai siapa saja yang suaranya terbatas oleh suatu akses yang mewakilinya. Misalnya, seorang pemimpin demonstrasi yang berkoar-koar mengenai hak asai kelas pekerja atau juga perempuan, entah siapapun yang berada di sana (orang kaya, orang miskin, atau siapapun), ketika suara mereka selalu terwakili dan mereka tidak memiliki kebebasan bersuara, mereka dapat dilihat sebagai *subaltern*. Di sini, Spivak menekankan pentingnya melihat mekanisme hegemonik yang tidak disadari mengenai penggunaan atribut kata *subaltern*. Mereka berada dalam wacana hegemonik yang berarti ada semacam manipulasi secara tidak sadar atas apa yang mereka lakukan (de Kock, 1992).

Tentu saja, Spivak di sini secara implisit mempertanyakan keterlibatan para akademisi dengan *the Other*. Baginya, agar *terbukti* keterlibatan yang otentis dengan *subaltern*, para akademisi harus menghapus dirinya sebagai sosok yang ahli di tengah hubungan sosial biner antara Kita (*Us*) dan Mereka (*Them*), Pusat dan Pinggiran, dan oposisi biner lainnya. Pada dasarnya, para

akademisi selalu ingin tahu tentang pengalaman *subaltern* dari kolonialisme, namun mereka tidak ingin berada di tengah pengalaman dominasi penjajahan. Tentu saja, ada semacam jarak yang memisahkan para akademisi dengan *subaltern*. Jarak tersebut menjelaskan bahwa kebenaran *subaltern* merupakan kebenaran yang berasal dari para ahli atau akademisi. Subjek yang tersubordinasi atau *subaltern* hanya menyerahkan pengetahuan tentang kolonialisme untuk *dimanfaatkan* oleh para akademisi, terutama para akademisi Barat.

... no need to hear your voice, when I can talk about you better than you can speak about yourself. No need to hear your voice. Only tell me about your pain. I want to know your story. And then I will tell it back to you in a new way. Tell it back to you in such a way that it has become mine, my own. Re-writing you, I write myself anew. I am still author, authority. I am still colonizer, the speaking subject, and you are now at the center of my talk (Hooks, 1990: 343).

... tidak perlu mendengarkan suaramu, ketika aku bisa membicarakanmu, itu lebih baik dari yang bisa kaukatakan sendiri. Tidak perlu mendengarkan suaramu. Katakan saja tentang rasa sakitmu. Aku ingin tahu ceritamu. Dan kemudian aku akan menceritakannya kembali kepadamu dengan cara baru. Katakan kembali kepadamu sedemikian rupa sehingga itu akan menjadi milikku, milikku sendiri. Menulis kembali tentangmu, aku sendiri menulis (dengan versi) baru. Aku masih sang penulis, yang memiliki otoritas. Aku masih penjajah, subjek yang berbicara, dan kamu sekarang berada di pusat pembicaraanku.

Selain masalah kekuasaan hegemonik dalam suara para *subaltern*, Spivak juga memperkenalkan istilah *esensialisme* dan *esensial strategis* sebagai fungsi

kontrol masyarakat pascakolonial. Spivak melihat bahwa esensialisme memiliki bahaya perseptual yang melekat pada subaltern. Ia berfungsi untuk menghidupkan (kembali) suara-suara *subaltern* dengan cara menawarkan heterogenitas dan menciptakan representasi stereotip dari berbagai identitas orang-orang yang membentuk kelompok sosial tertentu. Esensialisme tersebut dapat dilihat sebagai mimpi dari apa yang diharapkan oleh subaltern. Ia adalah sebuah manipulasi yang akan dimanfaatkan oleh kelompok representatif dari *subaltern*.

Sementara itu, istilah *esensialisme strategis* merujuk pada identitas kelompok dalam praksis wacana antarmasyarakat. Ia hadir untuk memfasilitasi komunikasi *subaltern* agar diperhatikan, didengar, dan dipahami. Esensialisme strategis hadir seolah-olah agar membuat suara-suara *subaltern* lebih mudah dipahami dan diterima oleh kalangan umum (antarkelompok). Esensialisme strategis menawarkan pentingnya perbedaan (subaltern bukan sebagai *the Other*) dan tidak mengabaikan keragaman identitas (budaya dan etnis) dalam kelompok sosial. Akan tetapi, dalam fungsi praktisnya, esensialisme strategis secara politis hanyalah alat yang memanfaatkan *subaltern*. Ini merupakan penerapan kekerasan epistemis Foucauldian yang menggambarkan kehancuran cara pandang masyarakat non-Barat dalam memandang dunia. Mereka dilindas dan dimanipulasi, sehingga memiliki cara pandang sebagaimana bangsa Barat dalam memandang dunia. Jika keseluruhan masyarakat hanya memiliki satu cara pandang, cara pandang Barat,

maka di sanalah kita tidak menyadari adanya kolonialisme dalam bentuk yang paling diskursif.

Bagi Spivak, kekerasan epistemik ini secara khusus berhubungan dengan perempuan, di mana perempuan yang subaltern (perempuan dari Dunia Ketiga) tidak pernah benar-benar dibiarkan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Mereka hanya dimanfaatkan untuk memantik rasa simpati yang nantinya akan bermanfaat untuk menjejalkan cara perspektif perempuan yang paling esensial layaknya perempuan Barat yang anggun, bebas, mandiri dan lain sebagainya. Itulah cara kekuasaan kolonial menghancurkan budaya non-Barat yang secara simultan mendorong masyarakat Timur untuk memahami dan mengetahui dunia sebagaimana masyarakat Barat memahami dan mengetahui dunia (Sharp, 2008: 109-130).

Terlebih lagi, Spivak lebih jauh memperingatkan agar tidak melihat orang-orang *subaltern* sebagai yang *Lain* yang berbudaya (*cultural Others*). Ia menilai bahwa dunia Barat dapat maju dan berkembang pesat melalui kritik serta introspeksi diri terhadap cita-cita dasar dan metode investigasi (penalaran), sehingga hal itu menggiring mereka untuk mempelajari budaya orang-orang non-Barat yang inferior. Di sanalah, bangsa Barat secara otomatis menjadi unggul secara kultural karena budaya mereka ditetapkan secara otomatis sebagai *standar* kebudayaan.

Oleh karena itu, integrasi suara subaltern ke ruang intelektual studi sosial menjadi masalah tersendiri karena adanya oposisi yang tidak realistis terhadap gagasan untuk mempelajari *the Other*. Tentu saja, Spivak membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai apa yang bisa mereka (*subaltern*

sebagai *the Other*) katakana. Spivak membuat kita menganggap bahwa kritik pascakolonial secara serius dapat menjadi praktik akademisi Barat untuk mendominasi melalui perkataan mereka tentang Dunia Ketiga. Namun, kita harus menyadari bahwa Spivak secara tersirat menolak sikap antiintelektual karena baginya, menolak mewakili budaya lain sama saja meniadakan nurani yang memungkinkan semua pihak untuk tidak mengerjakan *pekerjaan rumah* (baca: kewajiban manusiawi) mereka.

Dari sikap abu-abu Spivak tersebut, seharusnya kita dapat memahami secara tidak langsung bahwa kita seharusnya dapat memikirkan suatu pertanyaan mengenai kemampuan para *subaltern* untuk berbicara secara praktis, yang mewakili secara utuh apa yang ingin mereka ekspresikan, bukan dengan sepasukan kata-kata bersayap yang rumit dengan berbagai data, statistik yang filosofis dan teoretis. Hal ini dikarenakan setiap kajian teori dapat mengandung unsur kekuasaan wacana Barat yang nantinya akan menjebak mereka dalam lingkaran kuasa Barat. Selain itu, kunci utama yang juga dapat membuka borgol kekuasaan Barat adalah mengenai infrastruktur yang menghasilkan pengetahuan tentang dunia. Misalnya media (sosial) dan institusi pengepul pengetahuan seperti lembaga penelitian, universitas, dan perpustakaan yang penuh dengan rak sesak buku berbahasa Inggris, Prancis, Spanyol, atau Latin (karena bahasa menguncung wacana, kekuasaan dan ironisnya, ia adalah cara kita memahami dunia). Di sanalah, potensi terjadinya proses *heroik* Dunia Pertama yang mewakili Dunia Ke-

tiga.

Kita harus mulai mempertanyakan bagaimana kondisi struktural global terbuka terhadap suara lain atau apa yang membuat masyarakat Dunia Ketiga harus *berkewajiban* berbicara dengan masyarakat Dunia Pertama dalam bahasa mereka (seorang turis asing yang tidak dapat berbicara lokal dan warga setempat berusaha keras untuk mengikuti bahasa mereka, dan tidak seharusnya begitu karena secara geografis, mereka adalah yang *Lain*). Ada juga pertanyaan mengenai tanggung jawab jenis apakah yang membuat Geografer serta berbagai ahli Dunia Pertama mewakili Dunia Ketiga. Mereka hadir seolah-olah menganggap Dunia Ketiga belum mampu mewakili dirinya sendiri. Dari investigasi-investigasi semacam itu, studi pascakolonial akan menolak penggambaran budaya masyarakat *subaltern* karena itu hanyalah tipu muslihat kolonial Eropa Barat. Itu adalah cara Barat menguasai dan mempertahankan kekuasaannya atas Dunia Ketiga (Spivak, 1994: 66-111).

Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni

Intervensi kritis Spivak mencakup berbagai kepentingan teoretis, termasuk Marxisme, feminisme, dan dekonstruksi, yang dipoles dengan nuansa pascakolonial. Bersama dengan Said dan Bhabha, Spivak telah menantang konvensi disiplin kritik sastra dan filsafat akademis dengan memusatkan perhatian pada teks budaya masyarakat pinggiran (*subaltern*) yang didominasi oleh wacana dan budaya Barat. Apa yang dimaksud dengan masyarakat *subaltern* bagi Spivak meliputi para imigran, pekerja kelas bawah, perempuan Timur dan berbagai subjek pascakolonial. Mereka adalah orang-orang yang suaranya selalu diwakilkan, se-

hingga kehadiran mereka merupakan praktik dominasi.

Oleh karena itu, Spivak mencoba melihat secara dekonstruktif mengenai kehadiran subjek subaltern tersebut dengan mengkritisi pihak representatif yang seolah-olah mengetahui para subaltern. Terlebih, dengan memperjuangkan suara dan teks kelompok minoritas tersebut, Spivak secara tidak langsung menentang dan menantang berbagai modus dan motif representasi subalternitas untuk melepaskan subalternitas sebagai alat kepentingan mereka yang bertujuan menegaskan dominasi dengan membungkam suara para minoritas. Kaitan antara kritik Spivak dengan kritik dekonstruktif Derrida sangatlah dekat,

... when I first read Derrida, I didn't know who he was, I was very interested to see that he was actually dismantling the philosophical tradition from inside rather than outside, because of course we were brought up in an education system in India ... we were taught that if we could begin to approach an internalisation of that human being, then we would be human. When I saw in France someone was actually trying to dismantle the tradition which had told us what would make us human ... (Spivak, 1990: 7).

... ketika pertama kali membaca Derrida saya tidak tahu siapa dia, saya sangat tertarik untuk melihat bahwa dia sebenarnya membongkar tradisi filosofis dari dalam, bukan dari luar, karena tentu saja kami dibesarkan dalam sebuah sistem pendidikan di India ... kita diajari bahwa jika kita bisa mulai memahami internalisasi manusia, maka kita akan menjadi manusia. Ketika saya melihat di Prancis, seseorang

benar-benar mencoba membongkar tradisi yang telah diceritakan kepada kita apa yang akan membuat kita menjadi manusiawi, yang sepertinya juga menarik ...

Pengaruh dekonstruksi Derrida menjadi dasar kritis Spivak untuk melihat masalah dan dampak kolonialisme bagi masyarakat Dunia Ketiga, bukan dari luarnya, melainkan dari dalam diri masyarakat Dunia Ketiga. Bagi Spivak, dampak kolonialisme bangsa Eropa Barat tidak akan begitu mudahnya lenyap, karena bias dari perjumpaan budaya melalui tradisi kolonialisme, pasti akan menciptakan kekacauan identitas dan berbagai aspek budaya, terutama bagi bangsa yang dijajah. Mereka terjerembab dalam arus wacana dominan, yaitu wacana Barat. Masalah kultural, struktur sosial, politik dan ekonomi yang didirikan pada masa penjajahan secara korporatif meracuni bangsa pascakolonial seperti Asia, Afrika, atau Amerika tengah dan Latin misalnya India (Inggris), Aljazair (Prancis), sampai Meksiko (Spanyol) dan Brazil (Portugis).

Dengan kekacauan kultural tersebut, Spivak menekankan pentingnya untuk melihat nasionalisme yang antikolonial, justru menggunakan sikap borjuis yang secara politis dirasakan sebagai strategi untuk mereproduksi wacana sosial, kultural, dan politik yang kolonial (mendominasi), sehingga tidak mengherankan untuk melihat adanya ketidaksetaraan yang dominan pada masyarakat pascakolonial yang berkembang dan cenderung mirip dengan pemerintahan kolonial.

The insertion of India into colonialism is generally defined as a change from semi-

feudalism into capitalist subjection. Such a definition theorizes the change within the great narrative of the modes of production and, by uneasy implication, within the narrative of the transition from feudalism to capitalism. The most significant outcome of this revision or shift in perspective is the agency of change is located in the insurgent or the "subaltern." "Subaltern" is a political signifier within the social text (Spivak, 1987: 197).

Penyisipan India ke dalam penjajahan umumnya didefinisikan sebagai sebuah perubahan dari semi feodalisme menjadi penindasan kapitalis. Definisi semacam itu mencetuskan suatu teori perubahan dalam narasi besar mode produksi dan, dengan arti yang tidak sederhana, dalam narasi transisi dari feodalisme ke kapitalisme. Dampak yang paling signifikan dari revisi atau pergeseran perspektif ini adalah agensi perubahan yang ditetapkan sebagai pemberontak atau *subaltern*. *Subaltern* adalah penanda politik dalam teks sosial.

Spivak lebih lanjut menunjukkan bahwa kemunculan Amerika Serikat sebagai kekuatan super ekonomi global setelah Perang Dunia II telah mendesain ulang kolonial klasik yang berpusat pada kepentingan ekonomi, namun melalui trayek kapitalisme seperti perusahaan multinasional yang memiliki hak paten mendirikan perusahaan di atas tanah Dunia Ketiga. Itu merupakan proses neokolonialisme dalam bentuk yang lebih lembut. Mereka menguasai pasar ekonomi, memanfaatkan sisi ke-Barat-annya sebagai persuasi kultural yang menjadikan produk mereka unggul, merangkul Dunia Ketiga untuk mendapatkan status, dan lain sebagainya. Tentu saja, intervensi kritis yang di-

tunjukkan secara kolektif ini, menjelaskan bahwa Spivak, berupaya untuk menegaskan bahwa masalah kolonialisme belum usai, terutama masalah subalternitas yang selalu diwakilkan, baik oleh kelompoknya ataupun bangsa Barat.

Apa yang menjadi ciri khas dalam diskusi teoritis Spivak tentu saja adalah mengenai istilah *Subaltern*. Jika sebelumnya kita mengenal kata *subaltern* sebagai orang pinggiran atau orang yang secara sosial dan kultural dipinggirkan, maka apa yang harus ditekankan di sini adalah bahwa istilah *subaltern* yang digagas oleh Spivak sebenarnya merujuk pada siapa saja yang tidak memiliki kebebasan untuk bereksistensi. Artinya, siapa saja orang yang selalu terwakilkan oleh dominasi wacana kekuasaan terutama dalam konteks pascakolonial.

Pertama-tama, Seperti apa yang ditulis Stephen Morton (2003) bahwa Spivak menyadari adanya eksploitasi ekonomi yang begitu keji brutal yang dilakukan secara politis, sehingga ia melihat bahwa ada semacam dan penindasan politik terhadap kelompok-kelompok *subaltern* yang lemah dan tidak berdaya di dunia pascakolonial. Hal ini tentu saja menyajikan dilema etis dan juga tantangan metodologis bagi Spivak.

Sebagai orang India, ia mencoba untuk berkomitmen untuk membongkar masalah masyarakat Dunia Ketiga dengan cara yang etis, tidak dengan cara eksploitatif yang seolah-olah mewakili secara utuh situasi *subaltern*. Pengalaman penindasan sosial dan politik dalam masyarakat pascakolonial seperti India menjelaskan adanya perbedaan kelas, penataan wilayah yang politis, penyatuan bahasa yang dipaksakan, etnisitas dan

agama yang diidentifikasi, dan lain sebagainya. Pembelaan terhadap masalah tersebut memunculkan potensi masalah dan risiko bahwa setiap klaim umum atau pernyataan teoritis yang dibuat atas nama masyarakat subaltern tersebut (yang tidak dapat menyuarakan sendiri, yang selalu terwakilkan, dan yang tidak berdaya oleh intelektual akademis yang mampu menimbun tumpukan data dan beragumen secara teoritis) akan mengabaikan perbedaan sosial yang penting antara kelompok-kelompok *subaltern* tertentu.

Artinya, akan selalu ada dua masalah utama yang akan tergeletak di belakangnya; pertama muncul dugaan pemanfaatan situasi mereka dari suatu kepentingan dan kedua, akan selalu ada kelompok *subaltern* yang diabaikan (misalnya pemfokusan pada masalah kaum miskin, akan menanggalkan kaum perempuan, memfokuskan kaum perempuan akan menanggalkan kaum difabel, dan lain sebagainya). Dari sana, Spivak melihat bahwa kecurigaannya sangat logis, mengingat selalu lebih mudah membicarakan daripada mengalami, meski membicarakan bukan berarti pernah mengalami.

Dari sini, Spivak melibatkan pengetahuan kognitif kelompok intelektual dan pengalaman historis kelompok *subaltern* dalam suatu wadah pertanyaan untuk mengkritik upaya apapun yang menjadikan *subaltern* sebagai objek diskusi. Bagian dari usaha kritis ini mencerminkan kewaspadaan terhadap kesalahan yang dilakukan secara eksploitatif terhadap orang-orang yang kehilangan hak tersebut (Chow, 1993: 40). Spivak mengkritisi janji emansipatorisme nasiona-

lisme borjuis di India yang hadir untuk menawarkan kepuasan ideologis, pembebasan dan pemberontakan. Akan tetapi, apa dengan menawarkan narasi petani yang memberontak, perempuan India yang menentang lokalitas tradisi dan lain sebagainya, sudah menjelaskan inti masalah masyarakat *subaltern*?

Politikus serta penulis yang melontarkan kalimat-kalimat suci pembelaan kaum yang tertindas kemudian (politikus) menjadi pemimpin mereka dan (penulis) mendapatkan gelar dan uang dari tulisan mereka. Kita mungkin tidak menyadari bahwa ini sebenarnya bukan mengenai apa yang terlihat, siapa yang butuh dibebaskan atau siapa yang harus dibela, namun ini adalah bagaimana mereka melontarkan ekspresi mereka sendiri tanpa diwakilkan. Jika hanya melihat subaltern sebagai orang yang tertindas dan mereka harus dibela, maka hal ini justru menjelaskan sisi Marxisme yang bekerja di masyarakat *subaltern*, bahwa suatu kepentingan ideologis akan selalu ditunggangi oleh kepentingan ideologis lainnya, terlebih istilah *subaltern* merupakan istilah Gramscian.

Sebagai catatan, istilah *subaltern* secara konvensional merujuk pada seorang perwira berpangkat junior di tentara Inggris. Spivak sendiri mengembangkan istilah subaltern dari dari pemikir Marxis awal, Antonio Gramsci (1891-1937). Di dalam bukunya, *The Prison Notebooks*—buku yang berisi gugatan masa pemerintahan fasis Mussolini di Italia, Gramsci menggunakan istilah *subaltern* yang ia asosiasikan dengan istilah *bawahan*. yang menjelaskan adanya suatu kelompok hegemonik, sehingga secara nyata, menjelaskan adanya kelas (Gramsci, 1978: xiv). Secara implisit, *subaltern* di-

hadirkan sebagai sinonim kaum proletar (mungkin Gramsci menggunakan istilah ini sebagai sebuah kode manipulatif agar manuskripnya tidak dibekukan) (Morton, 2007: 96-97). Terlepas dari perdebatan alasan Gramsci menggunakan istilah *subaltern* daripada langsung menggunakan kata kaum proletar, namun intinya adalah Gramsci sudah menunjukkan konsep baru dalam teori politiknya yang menunjukkan adanya ketimpangan kelas (Green, 2011: 385-402). Dengan demikian, kelompok sosial *subaltern* diwacanakan dengan maksud terselubung untuk menumbangkan otoritas kelompok sosial yang memegang kekuasaan hegemonik (Garcia-Morena, dkk., 1996: 191-207; Chambers & Curti, 1996: 210).

Dari ringkasan definitif tersebut, jelas secara konteks, Gramsci menggunakan istilah *subaltern* untuk merujuk secara khusus kepada kelompok petani pedesaan yang tidak terorganisir yang berbasis di Italia Selatan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang di bawah kontrol kelompok dominan, sehingga mereka yang tidak memiliki kesadaran sosial atau politik sebagai sebuah kelompok yang sebenarnya mampu melawan. Oleh karena itu, dari kontrol sosial tersebut, hegemoni atas diri mereka memahat diri dan menguasai diri mereka. Mereka menjadi rentan terhadap suatu serangan gagasan, pengaruh budaya, dan otoritas kepemimpinan yang berkuasa di negara tersebut.

Catatan Gramsci tentang masalah sosial ini tentu saja telah dikembangkan lebih lanjut oleh sekelompok sejarawan yang dikenal sebagai kelompok kolektif *Studi Subaltern*. Mereka adalah

kelompok yang memperluas definisi Gramsci dengan menyisipkan atribut mengenai subordinasi yang juga berlaku di dalam masyarakat Asia Selatan. Konteksnya juga berkembang ke dalam permasalahan kelas, kasta, gender dan bahkan status pekerjaan di mata masyarakat (Guha, 1983: 35).

Diskusi Gramsci tentang penindasan kaum tani pedesaan di Italia Selatan juga secara tidak langsung menggambarkan secara tepat bagaimana penindasan kaum miskin di dalam masyarakat India pascakemerdekaan. Ini yang menjadi topik utama *Studi Subaltern*, terutama mengenai fakta bahwa negara pascakolonial, negara yang sudah memerdekakan diri, seperti India, belum secara praktis merevolusi tatanan sosial yang sesuai. Oleh karena itu, Spivak nampak ingin menjejalkan pendekatan Marxis klasik terhadap perubahan sosial dan historis, mengolahnya dengan konteks perjuangan atas penjajahan (perjuangan penjajahan dalam sejarahnya seakan mendiskreditkan perempuan) yang *genderless*, sehingga ia terkesan mencurigai pemberian secara efektif hak istimewa kepada subjek *subaltern* laki-laki sebagai protagonis dalam catatan sejarah, sementara perempuan hanya menjadi objek *subaltern*.

Akan tetapi, Spivak tidak melenggang begitu saja atas kritiknya tersebut, ia justru mendapati ada dua masalah utama yang perlu ditinjau ulang. Pertama, model Marxis klasik sangatlah maskulin (hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah ekonomi di mana laki-laki yang menggerakkan mesin perekonomian), sehingga ini mengabaikan perjuangan perempuan, terutama dalam kemerdekaan India (dalam tradisi umum, peperangan selalu mendiskreditkan perempuan, mereka selalu *dilindungi*, dise-

tarakan dengan anak-anak dan para orangtua— mungkin secara hak, perempuan merasa istimewa, namun mereka juga harus menyadari bahwa mereka hanyalah alat kesinambungan kehidupan, objek yang dapat melakukan reproduksi dan regenerasi, dan tokoh utama dalam perjuangan adalah para laki-laki). Oleh karena itu, perempuan akan terklasifikasikan lagi berdasarkan status kultural dan sosial, perempuan dari Dunia Pertama yang sudah didominasi oleh laki-laki Dunia Pertama dan perempuan dari Dunia Ketiga, yang merupakan objek *subaltern*. Kedua, model perubahan historis Marxis atau perjuangan kelas khas Marxis klasik, yang oleh para pemimpin nasionalis antikolonial awalnya diminta untuk memobilisasi wilayah *subaltern*, pada akhirnya justru mereformasi (menata ulang) keadaan sosial dan ekonomi subaltern dalam kekuasaannya (ideologi bekerja dengan cara mendorong kehadiran suatu resistensi dan menawarkan ideologi perlawanan sebagai solusi). Oleh karena itu, *subaltern* jika dipaksa dimasukkan dalam kritik Marxis klasik, justru akan menjelaskan bahwa mereka hanyalah komoditas.

Dari kedua masalah tersebut, Spivak mengajukan definisi *subaltern* yang lebih bernuansa *post-Marxist*; ia sekali lagi, akan menggerogoti masalah pascakolonial bukan dari dampaknya, malainkan dari sumber bagaimana diskusi mengenai subaltern diawali, terutama dengan mempertimbangkan kehidupan dan sejarah perempuan.

Lebih jauh lagi, sosiolog Boaventura de Sousa Santos dalam bukunya yang terkenal, *Toward a New Legal Common Sense* (2002), menjelas-

kan bahwa kaitan antara politik *subaltern* tersebut justru menciptakan suatu kondisi kosmopolitanisme *subaltern*. Ini merupakan sebuah istilah yang menggambarkan praktik kontra-hegemonik, suatu gerakan sosial yang resisten, sebuah perlawanan sosial, pergerakan melawan globalisasi neoliberal, dan sejenisnya, yang justru terpelintir dan membelit kelompok yang diperjuangkan. Oleh karena itu, kosmopolitanisme subaltern tersebut menjelaskan suatu proses legalitas kosmopolitan kekuasaan. Ia menggambarkan kerangka normatif, mengatasnamakan keberagaman yang setara, namun tetap saja secara khusus menunjuk secara intimidatif namun simpatik masyarakat tertindas, berkoar akan perjuangan melawan globalisasi hegemonik, namun meregulasi kekuatan tersebut di dalam tubuhnya. Kita pasti pernah mengirim ulang (*re-post*) sebuah gambar seorang nenek renta yang berdagang, kita mengasihinya dan mengajak semua untuk bersimpatik kepadanya, kemudian seorang gubernur, walikota, atau bupati mengundangnya untuk datang ke kantor mereka, mengundang awak media, menyebarluaskan beritanya, dan begitulah adanya. Itu adalah praktik politis dengan menjadikan perempuan *subaltern* tersebut alat untuk memuluskan kekuasaan.

Bagi Spivak. di India, perempuan, masyarakat pedesaan, dan pekerja imigran adalah bagian dari *subaltern*. Di antara mereka, ada orang perempuan buta huruf, orang pedesaan yang miskin, pekerja imigran yang dideportase, sehingga *subaltern* menjadi bagian yang tidak akan bisa diwakilkan dan tidak seharusnya diwakilkan demi kepentingan kelompok yang mengatasnamakan intelektualitas dan kemajuan.

Catatan Gramsci mengenai *subaltern*, bagi Spivak, telah menyediakan sumber teoritis utama untuk memahami kondisi kaum proletar di India. Ia memahami pembagian kerja di Italia era Mussolini dan menerapkannya pada pembagian kerja era kolonial di India. Gramsci melihat bahwa penindasan kaum tani pedesaan di Italia Selatan dapat diruntuhkan melalui sebuah aliansi kelas pekerja di perkotaan serta kesadaran kelas antarpetani sehingga tercapai revolusi Marxis (kelas pekerja industri di Eropa membawa potensi masa depan untuk perubahan sosial dan politik kolektif).

Masalahnya, Gramsci sendiri menyadari bahwa praktik sosial dan politik kaum tani pedesaan tidak sistematis (tidak terkoordinir) dan itulah yang menyebabkan kegagalan mutlak *perjuangan kelasnya*. Ini yang membedakan pengertian Gramsci tentang dunia *subaltern* dari persepsi Marxis klasik tentang kesadaran kolektif kelas pekerja. *Subaltern* Gramscian ini menjelaskan kurangnya identitas politik dan membuka ruang bagi Spivak untuk melihat fakta mengapa *subaltern* di dunia pascakolonial bernasib jika suaranya diwakilkan.

Di sini juga harus di sadari, memang arti istilah *subaltern* cukup luas dan mencakup berbagai konteks sosial yang berbeda. Dalam konteks sistem kelas dan sistem kasta di India secara sosial, definisi *subaltern* akan menggembung karena sejarah kolonialisme dan kemerdekaan bangsa yang berlapis-lapis. Menanggapi kondisi historis yang fluktuatif ini, Spivak sejak awal berusaha menemukan metodologi yang tepat untuk mengartikulasikan se-

jarah dan perjuangan kelompok *subaltern* ini.

Secara tradisional, sejarah kaum tani pedesaan dan kelas pekerja perkotaan telah dicatat oleh kelompok sosial elit. Pada dasarnya, kolonialisme, bukan hanya Inggris, menggunakan kekuasaan mereka dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah pengarsipan segala dokumen mengenai bangsa yang mereka jajah. Oleh karena itu, sejarah *subaltern* didokumentasikan di dalam arsip administrator kolonial. Mereka ditulis ulang dalam laporan sejarah elit kelas menengah berpendidikan bangsa yang terjajah.

Catatan tersebut yang digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan nasional. Dari *pemelintiran* tersebut, historiografi nasionalisme, terutama di India, telah lama didominasi oleh elitisme nasionalis borjuis. Keduanya berasal dari produk ideologis pemerintahan kolonial. Mereka mengasimilasi ke dalam bentuk diskursus neokolonialis. Dalam konteks sejarah India, tentu hal tersebut merujuk pada hubungan antara Inggris dan India (Guha, 1988: 37).

Itu adalah cara representasi sejarah dari berbagai kelompok *subaltern* kelas bawah dibatasi, dimanipulasi, dan dikacaukan dalam kepentingan kekuatan yang berkuasa atau tiap kelas sosial yang dominan. Dalam narasi elit kemerdekaan nasional borjuis, gerakan perlawanan lokal para petani justru ancaman yang nyata bagi masyarakat pascakolonial karena sejarah sosial dan politik yang kompleks dari kelompok *subaltern* tertentu pasti diwakili secara politis.

Dalam kasus India, adapun keberhasilan pemberontakan petani pedesaan terhadap pemerintah nasional India di daerah Naxalbari di

Bengal Barat pada tahun 1967, justru mendorong para akademisi *Studi Subaltern* untuk memikirkan kembali narasi kemerdekaan nasional dari perspektif yang lain. Perlu dilakukan suatu *rekonstruksi* dari berbagai sumber sejarah pemberontakan di tingkat subaltern. Subaltern harus otonom dan terpisah gerakan kemerdekaan nasionalis borjuis. Jika tidak begitu, maka itu sama saja kolonialisme yang menginternalisasi ke dalam diri subaltern. Upaya untuk menetralkan sejarah perlawanan otonom dan perjuangan nasionalis borjuis akan menjadi tantangan tersendiri, namun setiap kondisi dan situasi yang dialami masyarakat subaltern di manapun saat ini, sudah mencerminkan kondisi sosial dan praktik kekuasaan tertentu.

Dari sana kita juga memahami adanya suara politik dan agensi kelompok subaltern tertentu yang seringkali menyamar. Mereka tidak dapat dibedakan dari suara murni masyarakat subaltern yang spontan, tanpa isi, atau organisasi politik. Namun, ketika *subaltern* masih menjadi objek yang dipertaruhkan, maka di sanalah suara mereka tidak terdengar jelas. Bagi Spivak, dalam pembahasannya tentang proyek *Studi Subaltern*, gagasan Marxis klasik tentang sejarah menginformasikan pendekatan teoritis mengenai cara kerja ideologi yang justru akan memelintir dan membelit kelompok sosial. Oleh karena itu, *Studi Subaltern*, pastinya menawarkan gagasan perubahan. Ia melihat bahwa studi tersebut dapat menjejalkan kasus *subaltern* di India ke dalam diskusi kolonialisme yang berfungsi untuk melihat pergeseran sistem ideologis dari semi-feudalisme menuju penindasan kapital-

isme. Perubahan dalam narasi besar mode produksi menjelaskan bagaimana transisi tersebut berjalan dan korbannya tentu saja; masyarakat subaltern (Spivak, 1987: 197).

Tentu saja, diskusi Spivak menekankan bagaimana sejarah pemberontakan petani dan aksi sosial justru menghadirkan sebuah krisis. Spivak juga mempertanyakan metodologi Marxis dalam pendekatan *Studi Subaltern* yang justru cenderung menggambarkan kompleks kekisruhan pemberontakan *subaltern*.

Pemikiran Spivak sendiri tidak terjadi dalam kekosongan sejarah atau intelektual. Seperti yang diketahui, pemikiran India berkembang ketika Marxisme telah memainkan peran sentral dalam evolusi pemikiran politik di sana (Young, 2001: 312). Tidak mengherankan jika di India juga pernah hadir komunisme yang terpengaruh dengan gagasan Lenin mengenai partai-partai proletariat yang harus mendukung gerakan pembebasan dari kelompok nasional borjuis ((Young, 2001: 312). Hal ini juga pernah disinggung oleh Kiran Desai dalam novelnya, *The Inheritance of Loss* (2006) di mana ia menceritakan kisah pemberontakan Gyan terhadap bangsanya, India. Kisah yang menjelaskan partai komunis India yang menempatkan konflik kolonial di atas konflik kelas internal. Prioritas pembebasan nasional di atas kelas perjuangan jelas menjelaskan bagaimana kepentingan itu ada dan nyata dan secara *pongab* memanfaatkan masyarakat *subaltern*. Dalam sejarahnya juga, Marxisme sudah mempengaruhi pemikiran politik di India, baik dalam pemberontakan petani Naxalbari tahun 1967 melawan Partai Kongres seperti yang

pernah disinggung oleh Arundhati Roy dalam novel agungya *God of Small Things* (1998).

Kesimpulan

Dengan menempatkan kritik Spivak terhadap metodologi Marxis dalam konteks perdebatan-perdebatan politik sebelumnya, kita dapat melihat bahwa pemikiran Spivak merevisi dan menyesuaikan kategori pemikiran Marxis di luar konteks kapitalisme versus komunisme, karena baginya, bentuk-bentuk perjuangan pembebasan lainnya, seperti gerakan perempuan, perjuangan petani atau hak-hak minoritas pribumi, juga merupakan rantai masalah wacana kekuasaan hegemonik (Young, 2001: 351).

Dalam analisis Marxis tentang kapitalisme di Eropa, transformasi dalam hubungan ekonomi dan sosial antara kelas kepemilikan properti (atau kaum borjuis) dan kelas pekerja (atau proletariat) menjadi dasar bagi model perubahan sosial dan historisnya. Namun, dalam analisis Spivak tentang India, pergeseran historis dari feodalisme ke kapitalisme justru menawarkan catatan sejarah tentang bagaimana subjek terjajah dari kelas menengah-bawah justru menjadi objek kelompok nasional kolonialis. Objek yang berarti dimanfaatkan dan mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak berdaya, termasuk petani, perempuan dan kelompok masyarakat adat.

Daftar Pustaka

Chambers, Iain & Lidia Curti (eds.). 1996. *The Post-Colonial Question: Common Skies, Divided Horizons*. New York: Routledge.

- Chow, R. 1993. *Writing Diaspora: Tactics of Intervention in Contemporary Cultural Studies*. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.
- de Kock, Leon. 1992. "Interview with Gayatri Chakravorty Spivak: New Nation Writers Conference in South Africa", *ARIEL: A Review of International English Literature*. 23(3) 1992: 29-47.
- de Sousa Santos, Boaventura. 2002. *Toward a New Legal Common Sense*. London: LexisNexis Butterworths Tolley.
- Garcia-Morena, Laura and Pfeiffer & Peter C. (Eds.). 1996. *Text and Nation: Cross-Disciplinary Essays on Cultural and National Identities*. Columbia: Camden House.
- Gramsci, Antonio. 1978. *Selections from Prison Notebooks* (Terj. Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith). London: Lawrence and Wishart.
- Green, Marcus E. 2011. "Rethinking the Subaltern and the Question of Censorship in Gramsci's Prison Notebooks", *Postcolonial Studies*, Volume 14, Number 4: 385-402.
- Guha, R. 1983. *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*. Delhi: Oxford University Press India.
- Guha, R. 1988. "On Some Aspects of the Historiography of Colonial India", dalam Ranajit Guha & Gayatri Spivak (Eds.). *Selected Subaltern Studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Hooks, Bell. 1990. "Marginality as a Site of Resistance", dalam R. Ferguson dkk. (eds), *Out There: Marginalization and Contemporary Cultures*. Cambridge: MIT Press.
- Morton, Stephen. 2003. *Gayatri Chakravorty Spivak*. London & New York: Routledge.
- Morton, Stephen. 2007. "The Subaltern: Genealogy of a Concept", dalam Gayatri Spivak, *Ethics, Subalternity and the Critique of Postcolonial Reason*. Malden: Polity.
- Sharp, Joanne. 2008. *Geographies of Postcolonialism*. New York: SAGE Publications.

- Spivak, G. C. 1987. *In Other Worlds: Essays in Cultural Politic*. New York: Routledge.
- Spivak, G. C. 1990. *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues* (Ed. Sarah Harasym). New York & London: Routledge.
- Spivak, G. C. 1994. "Can the subaltern speak?" dalam P. Williams & L. Chrisman (eds), *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*. New York: Columbia University Press.
- Young, Robert J. C. 2001. *Postcolonialism: An Historical Introduction*. Oxford: Blackwell.